

Kebijakan Publik Tentang Penerapan Pendidikan Budaya Dan Karakter Di Sekolah

Supsiloani

Universitas Negeri Medan

Corresponding author : Supsiloinifis@Unimed.ac.id

Abstrak

Kebijakan Pendidikan merupakan kebijakan publik. Pendidikan merupakan milik publik dan tiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Pentingnya pendidikan karakter merupakan salah satu faktor diterapkannya pendidikan budaya dan karakter sebagai wujud kebijakan publik di dalam bidang pendidikan. Oleh sebab itu, dengan adanya pendidikan karakter, diharapkan sekolah dapat membimbing dan membekali anak-anak dengan moral dan juga budi pekerti yang dapat berguna bagi masa depan mereka dan masa depan bangsa. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan untuk membangun sebuah karakter seseorang untuk menjadi lebih baik dan pendidikan ini penting bagi setiap orang, dimana karakter tersebutlah yang akan mendominasi sifat atau identitas dari orang tersebut.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Penerapan Pendidikan Budaya Dan karakter

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan milik publik dan tiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Maka dari itu kebijakan pendidikan adalah program-program yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Tujuan analisis kebijakan publik bidang pendidikan ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan publik, mengetahui karakteristik kebijakan pendidikan dan untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan, terbukti dari adanya salah satu peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Peraturan tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : Tap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; ayat (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Dari penjelasan pasal ini pemerintah memberikan petunjuk bahwa pemerintah mendapatkan amanat untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan, selain itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.

Menurut Masnuh dalam (Amnur : 2007) pendidikan merupakan suatu kegiatan, proses, hasil dan sebagai ilmu yang pada dasarnya merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia sepanjang hayat guna memenuhi kebutuhan hidup. Pandangan ini secara umum telah menjadi istilah konvensional di masyarakat dan menjadi sarana bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan secara berkesinambungan.

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah dan tingkat satuan pendidikan. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan paling tinggi di Indonesia tentunya sangat mempengaruhi eksistensi dan prosesi pendidikan yang diharapkan memiliki standar mutu yang layak di dalam lingkungan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian keberadaan dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden dan seorang wakil presiden, jajaran kementerian, dan jajaran badan/ lembaga kelengkapan eksekutif negara adalah para pembuat kebijakan yang bisa mempengaruhi dunia pendidikan nasional

PEMBAHASAN

Kebijakan publik pada awalnya bersentuhan dengan masalah pelayanan. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan pelayanan. Bahkan, ekstrimnya, bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia (Ridwan dan Sudrajat, 2012: 17). Maka, tatkala masyarakat merasakan ada keganjilan dalam pelayanan yang diberikan oleh lembaga publik, yang tidak atau belum memenuhi harapan mereka, maka tentu akan menimbulkan komplain dari mereka. Karena sejatinya pelayanan itu menjadi hak masyarakat. Lantas, orang perorang yang terlibat langsung dengan kasus itu mengadakan permasalahan. Atau diangkat oleh media. Kasuspun kemudian menyeruak ke ruang public

Suatu kasus menjadi masalah publik karena menyangkut hajat banyak orang, dan dampaknya menyangkut banyak orang pula (Sundarso, 2012: 82). Sebuah kasus dapat dikategorikan menyangkut kebijakan publik, dengan 2 konsekuensi, lanjut Sundarso, *pertama*, mempunyai dampak bagi orang lain yang secara langsung bersangkutan, *kedua*, tindakan tersebut berdampak pada orang melebihi orang-orang yang secara langsung terlibat.

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang

diharapkannya secara efektif. Berbagai ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian kebijakan publik, diantaranya antara lain adalah sebagai berikut : menurut Dye (dalam Eddi, 2004: 45) yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah "Segala yang dilakukan pemerintah, sebab-sebab mengapa hal tersebut dilakukan, dan perbedaan yang ditimbulkan sebagai akibatnya". Sedangkan menurut Lasswell (dalam Eddi, 2004: 45) menjelaskan bahwa "Kebijakan publik adalah serangkaian program terencana yang meliputi tujuan, nilai, dan praktik". Dalam hal ini kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai program. Selanjutnya Feriedrick (dalam Nugroho, 2011:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan program yang dibuat oleh pemerintah dalam suatu negara yang ditujukan untuk mengatasi segala persoalan ataupun masalah-masalah yang ada ditengah-tengah masyarakat, baik yang sudah diterapkan maupun yang masih direncanakan. Pada dasarnya kebijakan publik dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam setiap pembuatan kebijakan, pemerintah harus mengacu kepada masyarakat karena objek dari kebijakan publik adalah kepentingan masyarakat.

Dalam kaitannya dalam bidang pendidikan, kebijakan pendidikan berangkat dari pemikiran Tilaar dan Nograho (dalam Bakry 2010) yang mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud didalam budayanya.

Kebijakan Pendidikan merupakan kebijakan publik. Pendidikan merupakan milik publik dan tiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak. Maka dari itu kebijakan pendidikan adalah program-program yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya.

1.1. Kasus Kebijakan Publik Tentang Penerapan Pendidikan dan Budaya Karakter di Sekolah

Maksud dan tujuan pemerintah membuat kebijakan publik berupa penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah adalah agar supaya generasi penerus bangsa mendapatkan pengetahuan mengenai budaya Indonesia yang baik dan juga pendidikan karakter yang dapat mempengaruhi dan merubah moral anak bangsa menjadi lebih baik.

Pentingnya pendidikan karakter merupakan salah satu faktor diterapkannya pendidikan budaya dan karakter sebagai wujud kebijakan publik di dalam bidang pendidikan. Dengan adanya pendidikan karakter, diharapkan sekolah dapat membimbing dan membekali anak-anak dengan moral dan juga budi pekerti yang dapat berguna bagi masa depan mereka dan masa depan bangsa.

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang bertujuan untuk membangun sebuah karakter seseorang untuk menjadi lebih baik dan pendidikan ini penting bagi setiap orang, dimana karakter tersebutlah yang akan mendominasi sifat atau identitas dari orang tersebut. Pendidikan karakter pertama kali dicetuskan oleh pedagog jerman F.W.Foerster (1869-1966). Pendidikan karakter ini menekankan etis spiritual untuk membentuk pribadi yang baik. Tujuan pentingnya pendidikan karakter menurut Foester, adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial antara subjek dengan perilaku dan sikap yang dimilikinya. Karakter merupakan pengualifikasi pribadi seseorang yang memberikan kesatuan dan kekuatan terhadap keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu karakter menjadi semacam identitas dari seseorang. Pendidikan karakter menawarkan sebuah konteks yang integral dan mampu mengatasi kepentingan dan keterbatasan diri sendiri. Pendidikan karakter juga merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, namun pendidikan karakter dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :

1. Pendidikan karakter internal

Pendidikan karakter secara internal didapatkan dari peran keluarga dalam membentuk kepribadian atau karakter itu sendiri seperti peran ayah dalam keluarga, , ibu, abang, dan lain sebagainya yang bisa menjadi contoh yang baik bagi karakter seseorang. Pendidikan karakter ini menjadi sangat penting karena sekitar 70% sifat dari keluarga akan menjadi contoh bagi sifat karakter orang dalam keluarga tersebut.

Orang tua dalam hal ini merupakan tameng dari pendidikan karakter tersebut, karena peran orang tua dalam mendidik anak sangat besar jika orang tuanya adalah bersifat religius maka besar kemungkinan karakter tersebut akan diturunkan kepada anaknya. Tentu orang tua akan mengajarkan hal yang identik dengan sifat dari kedua orang tuanya. Berbeda pula jika orang tuanya yang *broken home* maka akan berdampak pada karakter anak ataupun orang dalam keluarga tersebut, hal ini akan sangat berdampak negatif bagi karakter setiap orang dalam keluarga itu dan harus segera dihindari, jika kurang mendapatkan pendidikan karakter internal maka karakter eksternal yang harus diintegrasikan.

2. Pendidikan karakter eksternal

Pendidikan karakter eksternal dapat didapatkan dibanyak tempat seperti pendidikan karakter di sekolah, tempat bermain, tempat belajar bimbingan, atau bergaul bersama teman yang baik mengikuti organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, dan lain sebagainya. Pendidikan karakter eksternal juga penting didapatkan oleh setiap orang, karena jika mereka tidak mendapatkan pendidikan karakter secara internal maka pendidikan eksternal ini lah yang akan menjadi wadah dan sebagai tempat untuk meningkatkan kualitas karakter yang baik dari orang tersebut.

Sementara itu, pada saat sekarang ini di zaman modern bahaya globalisasi dan modernisasi sangat mempengaruhi karakter pribadi seseorang. Dimana efek dari globalisasi dapat membuat seseorang dapat cenderung ke hal yang negatif atau pun ke hal yang positif tergantung kita yang memfilternya, bila cenderung ke negatif maka perlu batasan-batasan yang bisa menghindarkan diri kita dari hal tersebut dalam konteks ini dapat dipelajari dengan menerapkan nilai – nilai pendidikan karakter. Berdasarkan hal tersebut maka perlulah menerapkan kebijakan publik khususnya yang menyangkut tentang pendidikan karakter di sekolah.

Dengan melihat definisi dan juga berbagai macam pendidikan karakter diatas, maka dalam hal ini pendidikan karakter mempunyai hal yang penting bagi seseorang . Adapun pentingnya pendidikan karakter bagi seseorang adalah dalam rangka untuk:

1. Mengenali identitas diri

Hal ini bertujuan untuk mengenali siapa diri kita yang sebenarnya, dengan begitu kita mengetahui apa fungsi kita, misalkan di identitas kita sebagai pelajar maka yang harus kita lakukan adalah belajar.

2. Menunjang kreatifitas

Kreativitas merupakan hal yang positif jika hal tersebut dapat terus ditingkatkan, dengan adanya pendidikan karakter ini lah kita dapat mengasah kreativitas seseorang agar menjadi lebih baik, kreativitas seseorang tentu berbeda-beda biasanya tergantung bagaimana hobinya, dengan terus mengasah hobi yang dimiliki seseorang tentu akan menimbulkan kreativitas yang lebih, dan jika ada permasalahan yang timbul maka akan cepat diatasinya.

3. Membentuk sifat yang baik

Pendidikan karakter juga membentuk sifat yang baik, terutama dari segi etika dan moral, etika seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan karakter akan cenderung negatif, terlebih faktor lingkungan yang selalu berperan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan adanya pendidikan karakter akan memberikan batasan-batasan apa yang baik dilakukan dan apa yang buruk, pendidikan karakter ini lah yang akan memfilter aktivitas seseorang.

4. Meningkatkan kepedulian terhadap sesama

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan seseorang untuk membantu dalam kehidupan sehari-harinya, dengan meningkatnya kepedulian terhadap sesama akan memberikan dampak yang positif dari diri seseorang tersebut, meningkatkan kepedulian terhadap sesama bisa dilakukan dengan sedekah, bergotong-royong antar RT dan RW setempat, sehingga mereka mengenal kita sebagai pribadi yang memiliki kepedulian.

5. Membangun sifat kepemimpinan

Sifat kepemimpinan seseorang tentu berbeda-beda tingkatan hal ini bisa dilihat ketika dia mengambil keputusan. Agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain. Maka sifat kepemimpinan harus dibangun. Dengan adanya pendidikan karakter ini akan mengajarkan seseorang untuk melatih sifat kepemimpinannya. Dengan begitu segala hal yang diputuskan akan memberikan hal yang positif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini pemerintah perlu melakukan penetapan yang harus dibuat menjadi kebijakan publik (Sundarso, 2012: 8.6). Adapun tahapan sesuatu menjadi kebijakan publik, secara garis besar, analisa kebijakan publik, sejak permulaan hingga penetapan kebijakan, adalah sebagai berikut:

- Penghimpunan informasi seputar kejadian (kasus) yang memiliki dampak luas,
- Memberikan informasi kepada *policy maker*, tentang permasalahan tersebut; Kasus yang dikemukakan diatas dalam kaitannya terhadap pentingnya kedudukan pendidikan karakter, dapat dikategorikan kebijakan publik, karena dalam tahapan penanganannya mengikuti proses sebagai berikut:
- Penyusunan agenda; sejak kasus mencuat dan menjadi perhatian publik, kemudian dilakukan pengagendaaan oleh pemerintah untuk dijadikan bahan pengkajian.
- Pengumpulan informasi; tahapan ini dimulai sejak mencuat hingga mengeksplorasi informasi tentang berbagai kasus tersebut. Karena berupa konflik, maka dilakukan penanganan agar dapat dicarikan penyelesaian yang terbaik.
- Negosiasi; melakukan langkah-langkah inisiasi, mediasi dan berbagai fasilitasi antar para pihak, dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Pengesahan; setelah diketahui masalah pokoknya, maka pemerintah sedapat mungkin membuat kebijakan berupa mengeluarkan peraturan pemerintah atau edaran atau ketetapan lain, dalam mensikapi arti pentingnya pendidikan budaya dan karakter di sekolah agar dapat mencegah peristiwa yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.

PENUTUP

Berdasarkan urain kajian pustaka dan pembahasan, maka kesimpulan dari tulisan ini adalah:

1. kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan hakikat pendidikan dalam proses memanusiakan anak manusia menjadi merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud di dalam budayanya.
2. Tujuan pemerintah membuat kebijakan publik berupa penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah adalah agar supaya generasi penerus bangsa mendapatkan pengetahuan mengenai budaya Indonesia yang baik dan juga pendidikan karakter yang dapat mempengaruhi dan merubah moral anak bangsa menjadi lebih baik.
3. Pentingnya pendidikan karakter bagi seseorang adalah dalam rangka untuk mengenali identitas diri, menunjang kreatifitas, membentuk sifat yang baik, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta membangun sifat kepemimpinan

REFERENSI

- Amnur, Muhdi Ali. 2007. *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahim.
- Bakry, Aminuddin. 2010. Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK, Volume 2, Nomor 1, April 2010*
- Mada, Sutapa. 2008. Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan No. 02/Th IV/Oktober/2008*
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik,(2012). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Sundarso, dkk. (2010). *Teori Administrasi Buku Materi Pokok MAPU5101 Edisi Kesatu*. Tangsel: Universitas Terbuka